

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEANJA DESA (APBDes) PADA PEMERINTAHAN DESA GUNUNG
KIJANG KABUPATEN BINTAN KEPULAUAN RIAU**

**Oleh :
Wahyu Fitrianto
NIM. 170565201008**

ABSTRAK

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengacu pada tingkat pertanggungjawaban yang di miliki oleh desa dalam pelaksanaan program APBDes terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. Pada Pemerintahan desa Gunung Kijang dalam pengelolaan APBDes masih terdapat beberapa fenomena dalam penyelenggaraannya seperti pelaporan yang masih mengalami kendala, hingga pengawasan lebih lanjut terhadap suatu program tidak dilakukan secara aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bidang pemberdayaan pada Pemerintahan Desa Gunung Kijang. Akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen di desa Gunung Kijang. Teori yang digunakan yakni teori Akuntabilitas dari Waluyo (2007) dengan Indikator, *employee* membuat laporan, pengukuran pertanggung jawaban, dan kewajiban transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan APBDes masih bervariasi, tergantung pada kapasitas aparatur desa, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan oleh pihak eksternal. Beberapa narasumber peneliti mengatakan bahwa desa telah menunjukkan praktik akuntabilitas yang baik, seperti transparansi dalam penyusunan anggaran dan pelaporan hingga realisasi anggaran, akan tetapi tidak semua sudut pandang narasumber sama dalam melihat fenomena tersebut. Dalam pengelolaan anggaran telah berjalan dengan baik namun masih terjadi keterlambatan pelaporan yang diakibatkan dari kurangnya daya serap pemerintah, sehingga anggaran bersisa dikarenakan anggaran tidak terserap dengan baik. Keterlambatan penyerapan anggaran ini tentunya di sebabkan oeh beberapa faktor, mulai dari kurangnya kualitas pejabat pengelola, kurangnya partisipasi masyarakat, hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya memajukan desa.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes)**

**ACCOUNTABILITY OF VILLAGE REVENUE BUDGET AND
EXPENDITURE MANAGEMENT (APBDes) IN THE GUNUNG KIJANG
VILLAGE GOVERNMENT, BINTAN REGENCY, RIAU ISLANDS**

**By :
Wahyu Fitrianto
NIM. 170565201008**

ABSTRACT

Accountability for Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDes) refers to the level of accountability that villages have in implementing the APBDes program towards the regional government and community. In the Gunung Kijang village government, in managing the APBDes there are still several phenomena in its implementation, such as reporting which is still experiencing problems, so that further monitoring of a program is not carried out actively. This research aims to analyze the level of accountability in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in the field of empowerment in the Gunung Kijang Village Government. Accountability is a key element in good governance, especially in the context of village financial management which aims to improve community welfare. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, through in-depth interviews, observations and document analysis in the village of Gunung Kijang. The theory used is the Accountability theory from Waluyo (2007) with indicators, employees making reports, measuring accountability, and transparency obligations. The research results show that the level of accountability in APBDes management still varies, depending on the capacity of village officials, community involvement, and supervision by external parties. Several research sources said that the village had demonstrated good accountability practices, such as transparency in budget preparation and reporting to budget realization, but not all sources' perspectives were the same in seeing this phenomenon. In terms of budget management, it has been running well, but there are still delays in reporting resulting from a lack of government absorption capacity, resulting in a budget remaining due to the budget not being properly absorbed. This delay in budget absorption is of course caused by several factors, ranging from a lack of quality management officials, a lack of community participation, to a lack of awareness of the importance of advancing the village.

**Keywords: Accountability, Management, Revenue and Expenditure Budget
Village (APBDes)**